

## BAB II

### KONDISI SOSIAL-POLITIK KABUPATEN DEMAK

#### 2.1. Karakter Geografis, Demografis, dan Struktur Sosial

Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Tengah bagian utara yang memiliki peran penting dalam dinamika sosial, ekonomi, serta perkembangan kawasan regional. Secara geografis, Demak berada pada koordinat 6°43'26''-7°09'43'' LS dan 110°27'58''-110°48'47'' BT, dengan bentang wilayah barat–timur sepanjang 49 km dan utara–selatan 41 km. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Jepara dan Laut Jawa di utara, Kudus dan Grobogan di timur, Grobogan dan Semarang di selatan, serta Kota Semarang di bagian barat (Pemkab Demak, 2025). Letak geografis tersebut menjadikan Demak bagian dari jalur Pantai Utara (Pantura) yang secara historis merupakan denyut pertumbuhan ekonomi Jawa, sekaligus menempatkannya dalam arus lalu lintas barang, jasa, dan mobilitas penduduk antarwilayah.

Tabel 2.1. Administrasi Wilayah Kabupaten Demak

| Aspek Administratif | Keterangan      |
|---------------------|-----------------|
| Luas Wilayah        | ± 89.743 hektar |
| Jumlah Kecamatan    | 14 kecamatan    |
| Jumlah Desa         | 243 desa        |
| Jumlah Kelurahan    | 6 kelurahan     |

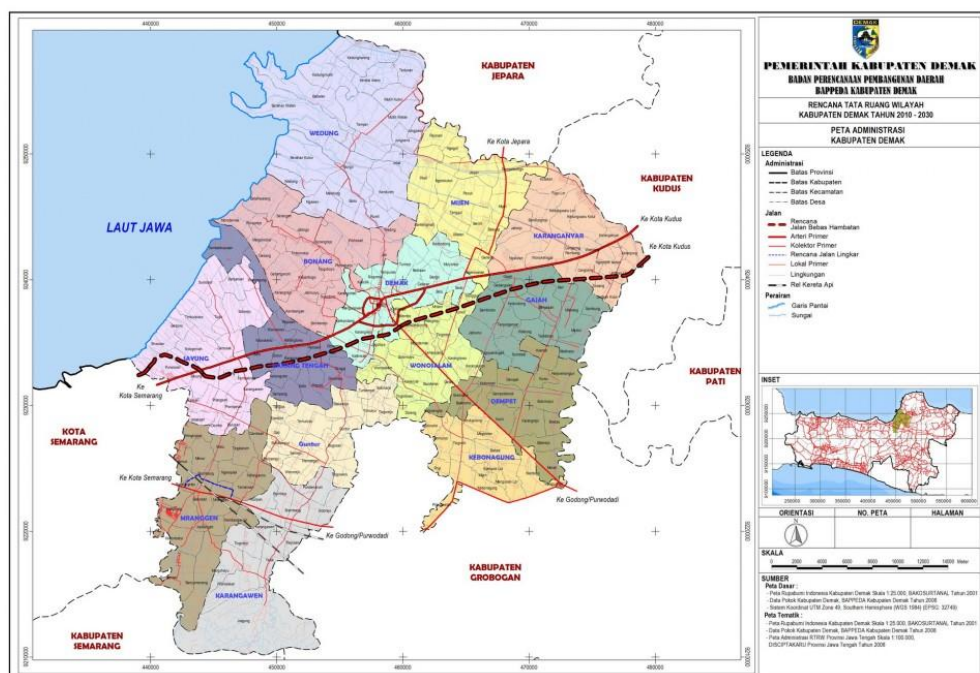
Sumber: Pemkab Demak (2025)

Dari sisi administrasi, Kabupaten Demak memiliki luas 89.743 hektar, yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan (Pemkab Demak, 2025). Secara spasial, karakteristik masing-masing kecamatan menunjukkan variasi geografis yang signifikan, mulai dari kawasan pesisir seperti Sayung, Wedung, dan Bonang, hingga kawasan yang lebih urban seperti Karangtengah, Demak Kota, dan Mranggen yang terhubung kuat dengan aktivitas ekonomi Kota Semarang. Perbedaan karakter wilayah ini membentuk pola ruang dan pola permukiman yang beragam, yang kemudian berpengaruh pada struktur sosial serta orientasi ekonomi masyarakatnya.

Karakter geografis Demak secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata yang relatif kecil, sehingga wilayah ini memiliki kerentanan ekologis yang tinggi. Beberapa kecamatan pesisir, terutama Sayung dan Karangtengah, mengalami rob, banjir pesisir, dan abrasi sebagai akibat dari penurunan muka tanah, perubahan garis pantai, serta limpasan air dari wilayah hulu. Dokumen RPJPD Daerah 2025-2045 mencatat bahwa kawasan pesisir Demak merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis seperti banjir, intrusi air laut, kekeringan, dan kebakaran lahan yang terus meningkat intensitasnya (Pemkab Demak, 2024). Keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang bermuara di wilayah pesisir turut memengaruhi dinamika hidrologi, menjadikan penataan ruang dan mitigasi bencana sebagai prioritas pembangunan wilayah.

Dalam struktur ruang regional, Kabupaten Demak berada dalam Aglomerasi Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-

Purwodadi) dan memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) pada beberapa kecamatan, khususnya Sayung, Karangtengah, Demak, dan Mranggen. Keterhubungan ini menunjukkan bahwa Demak tidak hanya berfungsi sebagai hinterland Kota Semarang, melainkan juga sebagai bagian integral dalam jaringan kota-kota nasional yang mendukung arus ekonomi, transportasi, dan distribusi komoditas di Jawa Tengah. Perkembangan urban di wilayah barat dan tengah Demak bahkan telah melampaui batas administratif kota, dengan fenomena urban sprawl yang mencapai radius 7 km dari pusat kota, didorong oleh ekspansi pemukiman, kegiatan jasa, dan aksesibilitas jalan nasional (Pemkab Demak, 2024).



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Demak

Sumber: demakkab.go.id (2024)

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2023 mencapai 1,246 juta jiwa, dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,414 juta jiwa pada 2045. Struktur penduduk menunjukkan dominasi usia produktif (15-64 tahun),

yang menghasilkan angka ketergantungan sebesar 44,51% pada 2025. Kondisi ini menandai fase bonus demografi, yaitu periode ketika jumlah penduduk produktif lebih tinggi daripada penduduk nonproduktif, sehingga berpotensi memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, proyeksi jangka panjang menunjukkan kenaikan signifikan kelompok usia lanjut (65+), dari 84 ribu jiwa pada 2023 menjadi 218 ribu jiwa pada 2045 (BPS Kab. Demak, 2025). Pergeseran ini menggambarkan arah menuju aging population, yang menuntut penyesuaian kebijakan pada bidang kesehatan, layanan sosial, serta penyediaan infrastruktur ramah usia.

Tabel 2.2. Kondisi dan Proyeksi Demografi Kabupaten Demak

| Indikator Demografi        | Keterangan                   |
|----------------------------|------------------------------|
| Jumlah Penduduk            | 1,246 juta jiwa (2023)       |
| Proyeksi Jumlah Penduduk   | 1,414 juta jiwa (2045)       |
| Kelompok Usia Dominan      | Usia produktif (15-64 tahun) |
| Angka Ketergantungan       | 44,51% (2025)                |
| Status Demografi           | Fase bonus demografi         |
| Penduduk Usia 65+          | 84 ribu jiwa (2023)          |
| Proyeksi Penduduk Usia 65+ | 218 ribu jiwa (2045)         |

Sumber: BPS Kab. Demak (2025)

Peningkatan penduduk juga memicu perubahan sosial dan spasial, terutama melalui proses urbanisasi dan urban desa. Seiring meningkatnya kebutuhan kerja dan perubahan struktur ekonomi, desa-desa di wilayah tengah dan barat Demak mengalami transformasi menjadi kawasan semi-perkotaan, ditandai dengan

peningkatan kepadatan pemukiman, menyusutnya lahan pertanian, serta pergeseran struktur keluarga dari komunal-tradisional menuju lebih individual dan mobil (Pekab Demak, 2024). Proses migrasi dan ekspansi ruang ini turut menggeser orientasi sosial masyarakat, dari basis agraris ke arah sektor jasa, industri, dan perdagangan.

Struktur sosial masyarakat Demak memiliki kedalaman historis yang kuat. Sejak masa Kesultanan Demak pada abad ke-15, wilayah ini menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa, sehingga nilai-nilai keagamaan, adat, dan kepemimpinan berbasis ulama sangat mempengaruhi tatanan sosial hingga saat ini. Di wilayah pesisir, struktur sosial dipengaruhi oleh komunitas nelayan dan petani tambak yang memiliki pola hidup komunal dan berbasis solidaritas ekologis. Tantangan lingkungan seperti abrasi, rob, dan penurunan kualitas ekosistem pesisir mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan berbagai upaya adaptasi, termasuk reboisasi mangrove dan penguatan kapasitas nelayan (BPS Kab. Demak, 2025). Adaptasi ekologis ini menciptakan pola sosial baru yang berorientasi pada resiliensi dan kolaborasi komunitas.

Karakter geografis, demografis, dan struktur sosial Kabupaten Demak saling berhubungan secara erat dan kompleks. Geografi pesisir dan dataran rendah membentuk kerentanan ekologis yang memengaruhi pola permukiman serta strategi adaptasi masyarakat, sementara dinamika demografi dan urbanisasi turut mengarahkan transformasi sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Pada saat yang sama, warisan sejarah dan struktur sosial berbasis religius memberikan identitas

kultural yang kuat yang masih membentuk nilai, norma, serta pola interaksi sosial masyarakat Demak.

## **2.2. Basis Keagamaan dan Struktur Kultural Masyarakat Demak**

Basis keagamaan masyarakat Kabupaten Demak tidak dapat dipahami semata sebagai karakter religius normatif, melainkan sebagai struktur kultural yang membentuk relasi sosial, otoritas, dan legitimasi kekuasaan di tingkat lokal. Keagamaan di Demak berfungsi sebagai fondasi nilai sekaligus kerangka institusional yang mengatur pola kepemimpinan, loyalitas sosial, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif masyarakat.

Secara historis, Demak menempati posisi simbolik penting dalam sejarah Islam di Jawa. Keberadaan Kesultanan Demak pada abad ke-15 sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa menjadikan wilayah ini sebagai pusat awal dakwah Islam Walisongo. Proses Islamisasi yang berlangsung di Demak tidak bersifat koersif, melainkan melalui strategi kultural asimilasi nilai Islam dengan tradisi lokal Jawa yang kemudian membentuk corak Islam tradisional yang moderat dan berorientasi komunal (Sunyoto, 2016). Warisan historis ini membangun memori kolektif masyarakat Demak sebagai “tanah Islam”, yang hingga kini terus direproduksi dalam identitas sosial dan simbolik masyarakat.



Gambar 2.2. Masjid Agung Demak

Sumber: waysata.com (2025)

Dalam perkembangan selanjutnya, struktur keagamaan tersebut melembaga melalui dominasi Islam tradisional yang berafiliasi kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU). NU tidak hanya hadir sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai institusi sosial-kultural yang mengorganisasi kehidupan keagamaan masyarakat, mulai dari pendidikan pesantren, ritual keagamaan, hingga praktik sosial sehari-hari. Dalam kerangka ini, agama berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur tatanan sosial, sekaligus sebagai sumber legitimasi moral dalam kehidupan publik (Feith, 2007).

Struktur kultural masyarakat Demak ditopang oleh keberadaan pesantren dan figur kyai sebagai aktor sentral. Pesantren berfungsi sebagai ruang produksi dan reproduksi nilai keagamaan, sekaligus sebagai institusi pembentuk jaringan sosial yang luas dan berkelanjutan. Kyai menempati posisi strategis sebagai

pemimpin simbolik dan kultural, yang otoritasnya bersumber dari kombinasi antara penguasaan ilmu agama, kharisma personal, serta legitimasi tradisional yang diwariskan lintas generasi. Relasi antara kyai dan masyarakat bersifat paternalistik, di mana kepatuhan dan loyalitas tidak semata didasarkan pada rasionalitas instrumental, tetapi pada ikatan moral dan kepercayaan religius (Van Bruinessen, 2013).



Gambar 2.3. Acara Haul Raden Fatah  
Sumber: dinkominfo go.id (2024)

Struktur kultural ini direproduksi melalui praktik keagamaan kolektif seperti pengajian rutin, tahlilan, yasinan, mujahadah, sholawatan, dan berbagai ritual keagamaan berbasis tradisi lokal. Praktik-praktik tersebut berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai sekaligus penguatan solidaritas sosial. Melalui ruang-ruang ini, jaringan sosial berbasis agama terbentuk dan dipelihara, menciptakan ikatan komunal yang kuat dan relatif stabil dalam jangka panjang.

Dalam konteks politik lokal, basis keagamaan dan struktur kultural masyarakat Demak sering dipersepsikan sebagai modal sosial dan elektoral. Organisasi keagamaan seperti NU memiliki kapasitas mobilisasi yang luas dan terorganisasi, sehingga afiliasi keagamaan kerap diasumsikan dapat dikonversi secara langsung menjadi dukungan politik bagi partai atau kandidat yang dianggap merepresentasikan identitas Nahdliyin (Arifianto, 2024). Asumsi inilah yang menjadikan Demak lama dikenal sebagai “daerah hijau” dan basis kuat partai-partai berbasis Islam, khususnya PKB pada era pasca-Reformasi.

Namun, pemaknaan terhadap basis keagamaan tersebut tidak dapat direduksi secara simplistik sebagai loyalitas politik yang bersifat otomatis. Suyahmo et al. (2018) menunjukkan bahwa identitas keagamaan di Demak berfungsi terutama sebagai sumber legitimasi kultural, bukan sebagai penentu tunggal perilaku politik. Identitas religius memberikan kerangka moral dan simbolik, tetapi pilihan politik masyarakat tetap dimediasi oleh faktor-faktor lain seperti konfigurasi elite lokal, jaringan patronase, kepentingan ekonomi, serta dinamika kekuasaan di tingkat daerah.

Basis keagamaan dan struktur kultural masyarakat Demak membentuk fondasi sosial yang kokoh, tetapi tidak bersifat tertutup atau deterministik. Agama, pesantren, dan otoritas kyai tetap berperan sebagai sumber legitimasi moral dan simbolik dalam kehidupan masyarakat, namun pengaruhnya dalam ranah politik bekerja melalui mekanisme yang lebih kompleks. Struktur kultural religius menyediakan kerangka nilai dan identitas kolektif, tetapi tidak secara otomatis mengarahkan preferensi politik masyarakat ke satu pilihan yang seragam.

Dalam konteks inilah, keagamaan di Demak perlu dipahami sebagai konteks sosial-politik, bukan sebagai variabel tunggal penentu perilaku elektoral. Kekuatan simbolik agama justru menjadi arena yang diperebutkan oleh berbagai aktor politik, dan efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana struktur tersebut diartikulasikan, dimobilisasi, dan dikombinasikan dengan faktor-faktor politik lain. Pemahaman ini menjadi penting untuk membaca dinamika orientasi politik dan perilaku pemilih lokal, yang berkembang di atas fondasi kultural religius tetapi tidak sepenuhnya dikendalikan olehnya.

### **2.3. Orientasi Politik dan Pola Perilaku Pemilih Lokal**

Orientasi politik dan pola perilaku pemilih di Kabupaten Demak menunjukkan karakter yang tidak tunggal dan tidak statis, meskipun beroperasi dalam konteks sosial-keagamaan yang kuat. Basis religius masyarakat Demak memang menyediakan kerangka nilai dan identitas kolektif, namun dalam praktik elektoral, preferensi politik pemilih dibentuk melalui interaksi kompleks antara loyalitas kultural, pengaruh elite lokal, figur kandidat, serta pertimbangan pragmatis yang berkembang dalam dinamika politik lokal.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Demak tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pemilih ideologis. Penelitian Prihatmoko dan Riyanto (2023) mengenai volatilitas pemilih dalam Pemilu DPRD Kabupaten Demak periode 2004-2019 mengungkap bahwa meskipun terdapat partai-partai dengan basis sosial-kultural relatif stabil terutama partai berbasis Islam tingkat volatilitas pemilih di Demak tergolong cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan

bahwa ikatan ideologis dan keagamaan tidak sepenuhnya mengunci pilihan politik pemilih dalam jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, orientasi politik pemilih Demak cenderung bersifat campuran (*hybrid*). Di satu sisi, terdapat segmen pemilih dengan loyalitas relatif konsisten terhadap partai tertentu yang berakar pada identitas keagamaan, afiliasi sosial, dan tradisi politik keluarga. Segmen ini umumnya masih memandang partai berbasis NU sebagai representasi politik yang sah dari identitas keagamaan mereka. Namun di sisi lain, terdapat segmen pemilih yang lebih cair dan pragmatis, yang mudah mengalihkan dukungan politik ketika dipengaruhi oleh figur kandidat, isu lokal yang kontekstual, atau dinamika elite politik setempat (Prihatmoko & Riyanto, 2023).

Konsep intersep politik yang diperkenalkan dalam studi tersebut menjadi penting untuk memahami perilaku pemilih lokal di Demak. Intersep politik merujuk pada faktor-faktor non-ideologis yang memengaruhi pilihan pemilih, seperti peran elite lokal, tokoh agama, jejaring patronase, serta kondisi sosial-ekonomi yang berkembang pada periode tertentu. Dalam konteks Demak, intersep politik bekerja melalui figur-figur berpengaruh baik kyai, elite partai, maupun aktor informal yang mampu membentuk preferensi pemilih secara situasional dan pragmatis.

Penelitian Fitriyah (2017; 2021) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa struktur kompetisi politik lokal di Demak tidak hanya ditentukan oleh preferensi pemilih secara individual, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan elite politik dan bisnis. Peran pengusaha lokal sebagai penyandang dana politik (*political investors*) secara signifikan memengaruhi peta kandidasi dan arah

dukungan partai. Dalam situasi ini, perilaku pemilih sering kali berlangsung dalam ruang kompetisi yang telah dikondisikan terlebih dahulu oleh aliansi elite, sehingga pilihan politik masyarakat tidak sepenuhnya otonom.

Dalam konteks kultural, praktik patronase dan politik transaksional di Demak kerap dilegitimasi melalui nilai-nilai sosial dan keagamaan seperti sedekah, kemurahan hati, dan relasi timbal balik. Politik uang tidak selalu dipersepsikan sebagai praktik yang bertentangan dengan moralitas religius, melainkan sering dipahami sebagai bagian dari kewajiban sosial dan etika berbagi. Kondisi ini menciptakan paradoks masyarakat religius: kuat dalam simbol dan identitas keagamaan, tetapi relatif permisif terhadap praktik politik pragmatis (Fitriyah, 2017).

Perkembangan media sosial dalam Pilkada Demak 2024 turut memperlihatkan transformasi penting dalam orientasi politik pemilih lokal. Studi Irfana et al. (2025) menunjukkan bahwa meskipun konten kampanye bernuansa religius masih memperoleh perhatian signifikan, tingkat keterlibatan publik tertinggi justru muncul pada narasi yang menampilkan kedekatan emosional, kesederhanaan kandidat, serta isu-isu konkret yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemilih Demak semakin mempertimbangkan aspek personal dan performatif kandidat, bukan semata afiliasi keagamaan.

Dalam perspektif Suyahmo et al. (2018), identitas keagamaan di Demak berfungsi terutama sebagai sumber legitimasi simbolik, bukan sebagai determinan tunggal perilaku politik. Identitas tersebut menyediakan kerangka moral dan

kultural yang penting, tetapi preferensi politik pemilih tetap dimediasi oleh dinamika kekuasaan lokal, relasi patron-klien, serta kalkulasi rasional terhadap peluang dan manfaat politik.

Orientasi politik dan pola perilaku pemilih di Demak memperlihatkan bahwa religiusitas tidak lagi bekerja sebagai mekanisme pengunci pilihan politik, melainkan sebagai latar kultural yang membingkai cara pemilih menilai kandidat, isu, dan relasi kekuasaan lokal. Loyalitas berbasis identitas keagamaan tetap hadir, tetapi beroperasi berdampingan dengan pertimbangan pragmatis yang dipengaruhi oleh figur kandidat, jaringan elite, patronase, serta isu-isu konkret yang menyentuh pengalaman keseharian masyarakat.

Kondisi ini menempatkan politik lokal Demak dalam situasi yang ambigu: kuat secara simbolik, tetapi cair secara elektoral. Dominasi historis partai berbasis Islam tidak lagi secara otomatis terkonversi menjadi dukungan politik yang solid dalam Pilkada. Preferensi pemilih semakin bersifat kontekstual dan situasional, bergantung pada kemampuan aktor politik membaca struktur kultural, mengelola konfigurasi kekuasaan lokal, serta menghadirkan kandidat yang dianggap relevan dan meyakinkan. Kerangka ini menjadi kunci untuk memahami dinamika Pilkada Demak 2024, sekaligus membuka ruang analisis atas ketegangan antara kekuatan struktural PKB dan hasil elektoral yang justru tidak sejalan.